



Lima proposal kebijakan diajukan untuk diskusi oleh komunitas di APNIC 56

[Open Policy Meeting](#) (Rapat Kebijakan Terbuka) pada konferensi APNIC 56 akan digelar pada tanggal 14 September 2023. Berikut ini adalah ringkasan dari empat proposal baru dan satu proposal kebijakan yang sedang dibahas.

prop-148: Penyewaan Sumber Daya Ditolak

Proposal ini mengusulkan untuk secara eksplisit menyatakan dalam dokumen kebijakan bahwa penyewaan alamat tidak diperbolehkan di wilayah APNIC.

Kebijakan APNIC saat ini tidak secara eksplisit menyatakannya, namun penyewaan alamat ditolak jika bukan bagian yang tidak terpisahkan dari layanan konektivitas. Secara khusus, kebutuhan bukan alasan yang pantas jika alamat itu bukan untuk koneksi langsung pelanggan ISP.

prop-152: Kurangi pendelegasian IPv4 dari /23 menjadi /24

Proposal ini menyarankan agar tetap mendelegasikan alamat IPv4 sesuai dengan kebijakan saat ini, namun, begitu habis ruang alamat IPv4 di pool yang tersedia, delegasi IPv4 maksimum dikurangi menjadi /24 dan IPv4 didelegasikan ke pemegang akun baru hanya dari ruang 'reserved' (cadangan) bila tersedia untuk delegasi.

Proposal ini juga menyarankan untuk membuat daftar tunggu bagi calon requestors (pemohon) berdasarkan siapa cepat dia dapat setelah habis semua ruang alamat IPv4 yang tersedia dan yang dicadangkan.

Menurut proposal ini, pemegang akun APNIC atau NIR yang telah mendapat alamat IPv4 tidak akan memenuhi syarat untuk pendelegasian IPv4 selanjutnya dari APNIC atau NIR setelah habis ruang yang tersedia saat ini.

prop-153: Proposal perubahan PDP

Proposal ini mengusulkan perubahan pada Bagian 4 Langkah 1 dari *Policy Development Process* (Proses Pengembangan Kebijakan PDP), untuk memperjelas panggilan proposal, tenggat waktu, dan penyerahan ulang proposal yang telah dikembalikan kepada penulis untuk diskusi lanjut dengan komunitas.

prop-154: Pengubahan ukuran penetapan IPv4 untuk IXP

Proposal ini menyarankan agar ukuran default penetapan IPv4 untuk *Internet Exchange Point* (IXP) diubah dari /23 menjadi /26, yang dapat diganti hingga maksimum /22 jika IXP mengembalikan ruang alamat IPv4 yang diberikan sebelumnya.

prop-155: Penetapan alamat IPv6 untuk Associate Member (Anggota Rekanan)

Proposal ini menyarankan agar Anggota Rekanan boleh mengajukan permohonan sumber daya IPv6 *Provider Independent* (Tidak Tergantung Penyedia) dengan kriteria alasan minimum, seperti saat ini tercantum dalam Bagian 9.1.4 dari pedoman APNIC untuk permintaan alokasi dan penetapan IPv6, tanpa alokasi IPv4 yang didelegasikan sebelumnya, dengan syarat pemegang akun akan menggunakan sumber daya ini dalam waktu 12 bulan ke depan.

Penetapan selanjutnya akan dievaluasi berdasarkan kebutuhan yang ditunjukkan pemohon dan ketaatannya pada kebijakan alokasi IPv6 APNIC saat ini.

Proposal ini merekomendasikan agar EC APNIC memperbarui Keanggotaan APNIC: *Tiers and Voting Rights* (Jenjang dan Hak Suara) Bagian 2.2 sesuai dengan perubahan yang diusulkan.

Menurut proposal ini, penetapan alamat IPv6 Tidak Tergantung Penyedia tidak boleh dipindahtangankan.

Berpartisipasilah! Utarakan pendapat Anda

Kebijakan yang baik bersandar pada berbagai pendapat dari berbagai orang di berbagai sisi komunitas, sehingga penting Anda ikut terlibat. Kebijakan itu dikembangkan melalui proses konsultasi dan kesepakatan yang terbuka, transparan dan dari kalangan bawahan ke atas.

Ajukan pendapat Anda tentang proposal kebijakan ini dengan bergabung di [milis](#) Policy SIG atau berpartisipasi secara langsung atau jarak jauh di forum [APNIC 56 Policy SIG](#).